

BAB II

PERAN AKTIF INDONESIA DALAM FORUM INTERNASIONAL TERKAIT MASALAH LINGKUNGAN GLOBAL

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perkembangan keikutsertaan Indonesia pada forum-forum internasional yang membahas mengenai masalah lingkungan global dari masa pemerintahan Presiden Soekarno sampai saat ini, serta kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan masyarakat internasional di bidang lingkungan.

A. Keterlibatan Indonesia dalam Forum Internasional di Bidang Lingkungan dari Masa ke Masa

Isu lingkungan pada mulanya kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Hal ini bukan saja dialami Indonesia sebagai Negara berkembang, tetapi juga oleh negara-negara lainnya. Kebijakan Indonesia saat ini masih lebih memfokuskan pada pemberantasan kemiskinan dan pembangunan yang berkesinambungan. Akan tetapi pada pasca berakhirnya periode Perang Dingin, upaya untuk memasukkan isu lingkungan ke dalam kebijakan luar negeri (*foreign policy*) telah dilakukan banyak negara termasuk Indonesia dalam kaitannya dengan politik internasional, khususnya sejak penyelenggaraan *United Nations Conference on Environment and*

Development atau Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Isu perubahan iklim ini menjadi penting karena beberapa tahun belakangan ini kerusakan ekosistem dunia semakin parah yang berakibat pada banyaknya terjadi bencana alam dan peristiwa alam lainnya dikarenakan lingkungan yang terus-menerus diganggu untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Dalam isu lingkungan, Indonesia telah berperan aktif dalam usahanya melindungi lingkungan yaitu dengan mengangkat masalah lingkungan ini ke dalam politik luar negerinya.

1. Masa Orde Lama (1945-1965)

Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno atau yang lebih dikenal dengan orde lama, Indonesia tidak terlalu banyak terlibat dalam berbagai forum internasional di bidang lingkungan. Hal ini karena pada masa itu pemerintah Indonesia lebih terfokus untuk mengurus masalah dalam negeri, seperti masalah ekonomi keamanan dan sebagainya, mengingat Indonesia baru saja merdeka dan menjadi sebuah Negara yang berdaulat.

Tercatat hanya ada satu forum dunia mengenai lingkungan yang diikuti Indonesia pada masa pemerintahan orde lama, *International Plant Protection Convention 1951*.¹³ *International*

¹³ Pramudianto, Andreas. *Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta*. UI-Press, Jakarta, 2008.

Plant Protection Convention (IPPC) merupakan sebuah kerjasama internasional yang bertujuan untuk melindungi tanaman diseluruh dunia yang berkedudukan di Kantor Pusat FAO, Roma. IPPC beranggotakan 177 negara, termasuk Indonesia. IPPC dikembangkan Negara Negara yang mempunyai kepedulian terhadap pentingnya kerjasama international dalam mengendalikan kerusakan pada tanaman dan hasil tanaman melalui pencegahan masuk dan tersebarnya organisme perusak tanaman secara internasional. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan delegasinya dalam setiap perundingan.

2. Masa Orde Baru (1966-1999)

Pada masa Orde Baru, Indonesia telah menegaskan perannya dalam berbagai forum dunia mengenai lingkungan, yaitu dengan pengiriman delegasi ke Konferensi Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia tahun 1972. Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia.¹⁴ Konsep lingkungan hidup

¹⁴ <http://www.menlh.go.id/tentang-kami/sejarah-klh/>, *Komitmen Internasional Terhadap Lingkungan*, diakses pada 17 Desember 2012.

manusia yang diperkenalkan menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar manusia di negara berkembang. Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan seluruh pemerintah di dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang bagi penyelamatan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan.

Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam Konferensi Nairobi 1982. Sepuluh tahun setelah Stockholm, dimana 105 negara menghadiri konferensi di Nairobi, Kenya.¹⁵ Konferensi ini merupakan perwujudan dari semakin meningkatnya kesadaran lingkungan global dan semakin diakui pentingnya pembangunan ekonomi. Beberapa isu yang menjadi pusat perhatian pada konferensi tersebut dan sekarang masih tetap relevan adalah : (1) masalah atmosfer, seperti menurunnya kualitas udara di permukiman kota, (2) pencemaran lautan oleh minyak bumi dan substansi lainnya; (3) pencemaran air permukaan dan air tanah;

¹⁵ <http://tyokronisilicus.wordpress.com/2010/05/11/perkembangan-hukum-lingkungan-internasional-untuk-mengatasi-perubahan-iklim-global-bag-1/>, Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional, diakses pada 17 Desember 2012.

dan (4) degradasi biota daratan dan tata lingkungan biologis. Perlunya pengelolaan lingkungan dan analisis dampak lingkungan serta pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan juga merupakan pokok bahasan penting pada Deklarasi Nairobi.

Pada United Nation Convention On Environment and Development (UNCED) atau yang lebih dikenal dengan KTT Bumi 1992, Indonesia juga berperan aktif dalam pelaksanaan perundingan tersebut. Di KTT Bumi, pemimpin dunia mengkompromikan rencana-rencana besar yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam tiga dokumen yang secara hukum mengikat (*legally binding*) dan tiga dokumen yang secara hukum tidak mengikat (*non-legally binding*).¹⁶ Jargon “*Think globally, act locally*”, yang menjadi tema KTT Bumi menjadi populer untuk mengekspresikan kehendak berlaku ramah terhadap lingkungan.

Selain ketiga Forum internasional tersebut, Indonesia juga terlibat dalam berbagai perundingan dalam masalah lingkungan,

¹⁶ Bambang Mardiono dan TIM Penyusun, *Kebijakan Dalam Forum Global*, Jakarta, 2004.

seperti *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*, *Convention on International trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 1973* hingga perundingan *Rotterdam Convention 1998*, serta keikutsertaan Organisasi Internasional seperti UNEP. Hal yang penting yang perlu dicatat di era Orde Baru ini adalah konsep dan kebijakan lingkungan hidup Indonesia untuk pertama kalinya dipersiapkan dalam rangka menghadapi Konferensi Lingkungan Hidup manusia di Stockholm 1972 melalui seminar tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan pada 15-18 Mei 1972 di Bandung.

3. Masa Reformasi sampai Sekarang

Pada era reformasi hingga sekarang, masing-masing masa Kepresidenan memiliki karakteristik yang khas dalam keikutsertaan dalam forum internasional di bidang lingkungan. Pada Era kepemimpinan Presiden Habibie (1998-1999) diplomasi lingkungan tetap dilaksanakan walaupun dengan adanya keterbatasan waktu. Salah satu bentuk kerjasama internasional yang dilakukan pada masa Presiden Habibie adalah kerjasama pertukaran satwa langka yaitu orang utan dan komodo untuk kegiatan penelitian antara Indonesia dengan Portugal.

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Indonesia berpartisipasi dalam *Millenium Summit* tahun 2000 dimana menghasilkan *Millenium Development Goal (MDGs)* dan keterlibatan delegasi RI untuk menandatangani *Stockholm Convention* 2001. Dan pada masa kepemimpinan Presiden Megawati (2001-2004) Indonesia menunjukkan peran pentingnya dalam forum internasional dengan menjadi tuan rumah *PrepCom IV WSSD* di Denpasar tahun 2002. Pada masa Presiden SBY, Indonesia berhasil menjadi *President of Governing Council United Nation Environment Programme (UNEP)* untuk periode 2005-2007 dan *President of the COP ke-13 UNFCCC/MOP Ke-3 Protocol Kyoto*.

B. Kerjasama Indonesia dengan Masyarakat Internasional dalam Masalah Lingkungan.

Kerjasama Internasional, baik itu dalam bentuk kerjasama bilateral ataupun kerjasama multilateral dalam masalah lingkungan hidup telah lama dilakukan, terutama setelah tahun 1972 yaitu setelah diadakannya Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia. Dalam kerjasama bilateral sifatnya biasanya masih dalam bentuk kerangka kerjasama teknis dalam melakukan proyek-proyek pembangunan. Peningkatan kerjasama

bilateral di bidang lingkungan hidup mulai menonjol sejak era 80-an hingga sekarang.

Dengan didirikannya beberapa badan kerjasama internasional seperti, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *Canadian International Development Agency (CIDA)*, *United State Aid (USAID)*, AUSAID dan sebagainya, hal ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama terutama dalam memperoleh bantuan Teknis, Sumberdaya manusia dan bantuan dana kerjasama baik dalam bentuk pinjaman ataupun hibah dan atau bentuk-bentuk skema pendanaan lainnya seperti penghapusan utang untuk alam dan bidang lainnya. Hingga saat ini lebih dari 50 hubungan bilateral telah dilakukan melalui hubungan diplomatik setingkat Duta Besar hingga *Minister Resident*.

Hingga saat ini ada beberapa kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dengan beberapa Negara di dunia mengenai masalah lingkungan. Kerjasama bilateral tersebut antara lain dengan Negara :

1. Inggris

Kerjasama dalam bidang lingkungan terutama dilakukan dalam bidang menegemen sumber daya alam, efisiensi energy, bantuan bagi I.S.M. keanearagaman hayati. nemanasan global dan

sebagainya, dimana kerjasama tersebut dilakukan melalui Kedutaan Besar Inggris dan *British Council*.

2. Jerman

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman dalam bidang lingkungan hidup terutama dilakukan pada pengembangan Sumberdaya manusia, hukum lingkungan, kelembagaan lingkungan, pengelolaan tata ruang dan sebagainya, dimana badan utama yang penting dalam mengembangkan kerjasama di Indonesia diantaranya adalah GTZ dan proLH.

3. Finlandia

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Finlandia dalam bidang lingkungan diantaranya adalah kerjasama dalam system pengelolaan hutan tropis, keanekaragaman hayati, penelitian mengenai hutan dan ekologi dan sebagainya, dimana kerjasama tersebut dilakukan melalui FINNIDA dan Kedutaan Besar Finlandia.

4. Belgia

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belgia dalam masalah lingkungan terutama dalam pengembangan partisipasi kelompok

5. Perancis

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Perancis dilakukan dalam bidang perencanaan Perkotaan, Pencemaran air, Pengemangan sumber daya alam dan sebagainya.

Selain bentuk kerjasama bilateral yang telah disebutkan di atas, masih ada banyak lagi kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dengan Negara-negara lain di dunia dalam masalah lingkungan. Indonesia juga aktif dalam berbagai kerjasama regional dalam berbagai Organisasi Internasional Regional, seperti :

1. ASEAN

Dalam masalah perlindungan hutan, kebakaran hutan, asap lintas batas dan sebagainya, dimana kerjasama ini dilakukan dengan adanya pertemuan tingkat Menteri Negara anggota ASEAN setiap tahunnya.

2. ASEAN-UE

Kerjasama dalam masalah illegal logging, pencemaran hutan, keekaragaman hayati dan sebagainya, yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan tingkat Menteri dan pejabat tinggi ASEAN-UE ini Eropa yang diadakan setiap tahun

3. APEC

Kerjasama dalam masalah perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati dan sebagainya yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan kepala Negara dan pemerintahan melalui KTT.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya sebagai anggota aktif masyarakat internasional, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap masalah lingkungan dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional yang terkait dengan masalah lingkungan serta mengadakan kerjasama, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral dalam bidang lingkungan. Dan dari uraian tersebut pula kita dapat mengetahui bahwasanya kepedulian Indonesia dalam masalah lingkungan seperti halnya terbatas pada masalah hutan, pemanasan global, polusi, keanekaragaman hayati dan sebagainya. Belum ada perhatian khusus dari pemerintah Indonesia mengenai masalah kelautan mengingat hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Baru pada tahun 2007 muncul gagasan dari Indonesia untuk menggagas suatu kerjasama dalam masalah kelautan dan terumbu karang yang diberi nama *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food*